

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Netralitas ASN sangat diperlukan dalam kontestasi pemilihan umum untuk mewujudkan Pemilu yang transparan, adil dan akuntabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui alasan Aparatur Sipil Negara harus netral dalam kontestasi Pemilu untuk penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Implementasi netralitas ASN dalam kontestasi Pemilu, di samping itu juga untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap pengawasan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi Pemilu di Kabupaten Pati.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dari data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis interpretasi data kualitatif dan didukung menggunakan data kuantitatif.

Hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini menunjukkan tidak ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pati, Namun dalam pelaksanaan pengawasan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi Pemilu di Kabupaten Pati mengalami beberapa hambatan berupa kurangnya anggota pengawas dalam 1 kecamatan dan juga kurangnya peran masyarakat dalam melaporkan Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar netralitas ASN.

Kata Kunci: Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilu, AAUPB

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of neutrality of the State Civil Apparatus in the General Election contestation for government administration based on general principles of good governance. The neutrality of ASN is very necessary in general election contestation to make elections transparent, fair and accountable. This research also aims to find out the reasons why the State Civil Apparatus must be neutral in election contestations for government administration based on general principles of good governance, implementing the neutrality of ASN in election contestations, in addition to knowing the obstacles and solutions to the supervision of the Personnel, Education and Civil Service Agency. Research and the Pati Regency Election Supervisory Agency on the neutrality of the State Civil Apparatus in the Election Contestation in Pati Regency.

This research uses an empirical juridical approach method, the data used in this research uses primary data and secondary data. Primary data in this research was obtained from data from the Civil Service, Education and Research Agency and the Pati Regency Election Supervisory Agency, while secondary data was obtained through literature study of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is a qualitative data interpretation analysis method and is supported using quantitative data.

The results of research in Legal Writing show that there were no violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in Pati Regency. However, in the implementation of supervision by the Civil Service, Education and Research Agency and the Pati Regency Election Supervisory Body regarding the neutrality of the State Civil Apparatus in the election contestation in Pati Regency, there were several obstacles in the form of a lack of supervisory members in 1 sub-district and also the lack of community role in reporting State Civil Apparatus who are proven to have violated the neutrality of ASN.

Keywords: Neutrality, State Civil Apparatus, Election, AAUPB